DARI INDONESIA, BERBUAT LEBIH KEPADA WARGA DUNIA YANG RENTAN

[FROM INDONESIA, DOING MORE TO THE WORLD'S VULNERABLE CITIZEN]

Untuk Masa Depan yang Lebih Sejahtera,
Berperikemanusiaan dan Inklusif

[For A More Prosperous, Humane and Inclusive Future]

Enabling Recover Together, Recover Stronger
Hamemayu Hayuning Bawana

Enabling Recover Together, Recover Stronger
Hamemayu Hayuning Bawana

FEBRUARI, 2022

CIVIL 20 Presidensi Indonesia 2022
Usulan Kertas Kebijakan Kelompok Kerja SDGs dan Humanitarian

Dari Indonesia, Berbuat Lebih kepada Warga Dunia yang Rentan
Untuk Masa Depan yang Lebih Sejahtera, Berperikemanusiaan dan Inklusif

Vol.1 Februari

CIVIL 20 Presidensi Indonesia 2022

Usulan Kertas Kebijakan Kelompok Kerja SDGs dan Humanitarian

Penulis

Andri Utami
Bona Tua Parlinggomon Parhusip
Fredy Chandra
Karla Mariana Klau
Puji Pujiono
Ratna Yunita
Syamsul Ardiansyah
Wahyu Susilo
Zulyani Evi
Zubedy Koteng

Editor Penulis

Mickael Bobby Hoelman

Diterbitkan oleh
CIVIL 20 Presidensi Indonesia 2022

Kelompok Kerja SDGs dan Humanitarian

Februari 2022

Email : c20.secretariat@g20-indonesia.id
Laman : www.civil-20.org

Cetakan Pertama, Februari 2022

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Abstrak

Kepresidenan Indonesia di Kelompok Negara 20 menjadi "titik kritis" strategis setelah lebih dari dua tahun dunia mengalami masa pandemi pertama kali dalam abad ini (*a once–in –a–century pandemic*) dengan referensi yang relatif minim terhadap pengalaman kehati–hatian terhadap beragam skenario pilihan kebijakan atas kejadian pandemi yang berskala global. Keputusan–keputusan yang diambil dalam kepemimpinan Presiden Jokowi akan sangat menentukan respons solusi yang efektif terhadap masa depan dunia guna pulih serta berdaya bangkit lebih kuat secara bersama–sama mencapai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sebagai negara menengah, Indonesia menjadi jembatan negara–negara maju sekaligus penyambung lidah negara miskin–berkembang. Indonesia kini tak lagi menaruh tangan di bawah (meminta) akan tetapi juga telah mulai turut serta memberi contoh dengan tangan di atas (memberi). Presidensi Indonesia dalam Kelompok Negara 20 harus membuktikan kepemimpinan Indonesia yang bekerja untuk kepentingan semua (inklusif).

Meningkatnya risiko sistemis global menyadarkan bahwa potensi krisis tidak mungkin lagi dapat ditangani dengan cara–cara seperti biasanya. Keterkaitan krisis kesehatan dengan krisis ekonomi, konflik sosial serta kerusakan lingkungan dan iklim berpeluang memundurkan capaian pembangunan global terutama akibat ketidaksetaraan akses dan sumber daya antarnegara dalam menghadapi pandemi. Meningkatnya ketimpangan serta risiko dapat mengancam upaya pemulihan yang berkelanjutan. Agenda pemulihan ekonomi global sejatinya dibarengi oleh agenda penanganan krisis kemanusiaan dan perubahan iklim. Sebagai donor utama, Kelompok Negara 20 harus memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan pembangunan kemanusiaan dengan membentuk strategi penargetan yang menangani kebutuhan mendesak dan tujuan pembangunan jangka panjang dari populasi yang terkena dampak krisis.

Kelompok Negara 20 perlu mengembangkan visi lebih luas terkait hak asasi manusia dengan tidak semata menangani kebutuhan, akan tetapi menyiratkannya dalam kebijakan agar suara warga dunia yang paling rentan dapat dipertimbangkan (pemberdayaan) dalam pelaksanaan seluruh komitmennya. Di masa pandemi, perlindungan bagi warga paling rentan tersebut merupakan kewajiban untuk mencegah pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Sebagai komunitas internasional, Kelompok Negara 20 memiliki peran dan pengaruh besar untuk mempengaruhi bahkan menciptakan norma–norma internasional baru.

Kelompok Negara 20 perlu mengoreksi arsitektur ekonomi global melalui upaya pengurangan biaya remitansi. Ketimpangan ekonomi berpeluang menghilangkan capaian dekade pembangunan terutama bagi negara–negara miskin dan berkembang yang masih berkubang dalam siklus kemiskinan,

kelaparan, utang dan deraan penghematan di tengah pandemi. Dengan semakin terintegrasinya ekonomi global, migrasi tenaga kerja turut memiliki peranan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui remitansi. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, semestinya biaya pengiriman uang dari luar negeri dapat lebih murah dan mudah diakses oleh para pekerja migran. Kelompok Negara 20 juga perlu menjamin akses terhadap layanan kesehatan universal terutama bagi kelompok migran, termasuk para pekerja migran sebagaimana telah dinyatakannya pada presidensi sebelumnya di Roma.

Kelompok Negara 20 hendaknya mengadopsi perlindungan sosial adaptif yang berpihak kepada anak sebagai generasi pemilik masa depan. Kelompok Negara 20 perlu memperkuat kemampuan memahami ancaman krisis serupa yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Dalam kaitan tersebut, skenario mengurangi dampak semestinya mencakup analisis tentang proyeksi krisis yang kelak terjadi, misalnya dengan menerapkan *strategic foresight* yang ramah anak.

Tantangan–tantangan

Krisis multidimensi akibat pandemi Covid–19 di abad ini telah memperlebar jurang kesenjangan terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial, menghancurkan banyak mata pencaharian warga dunia, serta memaksa peralihan kerja kepada sektor informal, usaha kecil dan menengah, pekerja mandiri atau pekerja tanpa kontrak, hingga pekerja rumah tangga. Perekonomian global terus menunjukkan pemulihan meski kebangkitannya tidak setara dialami oleh berbagai negara, sektor usaha, hingga warga dunia yang menghadapi realitas ekonomi yang sangat berbeda–beda. Dalam deklarasi Kelompok Negara 20 di Roma tahun lalu, para pemimpin negara–negara tersebut mengakui bahwa wabah Covid–19 menjadi tantangan yang maha hebat bagi masyarakat di seluruh dunia. Pandemi telah memperburuk jurang ketimpangan di dalam pasar kerja, mengakibatkan beragam dampak bagi para pekerja rentan (lihat Deklarasi; #35; 2021).

Pandemi menambah sedikitnya 20 juta orang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem dengan 82,4 juta orang mengungsi secara paksa dan 161 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut (lihat UNOCHA, 2022). Akibat pandemi, jumlah warga dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem diperkirakan bertambah 70 juta dari tren sebelum pandemi dan telah memundurkan capaian pengurangan kemiskinan hingga beberapa tahun ke belakang (IMF, 2022). Laporan yang lain turut mengingatkan jika pandemi berpeluang menghilangkan capaian dekade pembangunan terutama bagi negara–negara miskin dan berkembang yang masih berkubang dalam siklus kemiskinan, kelaparan, utang dan deraan penghematan di tengah pandemi (IATF, 2021). Jauh hari sebelumnya, Perserikatan Bangsa–Bangsa memperingatkan manakala pemulihan ekonomi atas pandemi berlangsung lebih lama, timpang dan tanpa ketidakpastian diperkirakan

750 juta penduduk dunia dapat terperosok ke dalam jurang kemiskinan yang paling parah pada tahun 2030, dengan seperempat dari antaranya atau sekitar 169 juta orang terjebak dalam situasi kemiskinan ekstrem sebagai akibat langsung dari pandemi (lihat UNDP, 2021).

Satu dari 29 warga dunia kini semakin memerlukan bantuan dan perlindungan kemanusiaan atau secara total jumlahnya telah mencapai274 juta jiwa, bertambah 39 juta jiwa dari angka tahun lalu, di mana 184 juta di antaranya merupakan kelompok warga yang benar–benar memerlukan pertolongan (lihat Global Humanitarian Overview, 2022). Anak–anak, terutama perempuan telah kehilangan pendidikan mereka. Hak–hak perempuan terancam dan dekade pembangunan berada dalam bahaya. Pembatasan mobilitas dan disrupsi dalam rantai suplai global telah memberi dampak tidak saja bagi kesejahteraan, akan tetapi juga terhadap kesehatan mental akibat pengangguran, kerawanan pangan, isolasi, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta terbatasnya akses ke pendidikan, kesehatan seksual dan reproduksi.

Kemajuan menuju perluasan hak dan kesempatan bagi perempuan terus menerus diuji dan terhambat sebagaimana ditunjukkan oleh hanya 1 dari 18 indikator (termasuk sub–indikator) yang dinilai mendekati target (UN Women, 2021). Tanpa akselerasi kemajuan yang berarti, warga dunia akan gagal memenuhi janji untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2030. Karenanya, para pemimpin Kelompok Negara 20 juga telah menegaskan komitmen mereka untuk memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak perempuan serta warga masyarakat rentan yang memerlukan kebutuhan dan perhatian (lihat Deklarasi; #8; 2021).

Bantuan kemanusiaan semakin penting di tengah badai varian baru Covid–19 dan gelombang ketiga pandemi yang disertai situasi darurat iklim hingga deraan konflik di beberapa belahan dunia. Krisis iklim yang berlangsung mendesak tindakan internasional sebelum melipatgandakan risiko bagi perekonomian global. Bencana alam menambah ancaman bagi rantai pasokan global di tengah minimnya komitmen untuk mengurangi efek gas rumah kaca dan pembatasan peningkatan suhu global hingga 2 derajat Celsius di atas tingkat pra–industri. Disrupsi pasokan di pasar energi, pangan dan komoditas tersebut telah mendorong kenaikan harga dan khususnya memukul rumah tangga miskin. Arah kebijakan yang lebih terkoordinasi karenanya mendesak dibutuhkan guna memenuhi tujuan baru yang ditetapkan dalam konferensi perubahan iklim Glasgow (COP26) guna mencegah bencana perubahan iklim dunia (lihat IMF, 2022).

Sementara itu, volume bantuan kemanusiaan internasional luar negeri mengalami stagnasi dikarenakan kebanyakan negara maju memilih mengurangi tingkat pendanaan mereka untuk kebutuhan kemanusiaan yang tidak terkait dengan pandemi. Sementara, dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kebutuhan pendanaan bagi operasi bantuan kemanusiaan tumbuh eksponensial dari

USD 9,2 Miliar pada tahun 2012 menjadi USD 41 Miliar di tahun 2022 (op.cit. Global Humanitarian Overview, 2022). Alih–alih, sebuah laporan yang diterbitkan tahun lalu menunjukkan rerata hanya 60 persen dari total kebutuhan pendanaan bagi operasi kemanusiaan yang dapat terpenuhi, yang mana bahkan dalam kurun waktu dua tahun terakhir menukik hingga di bawah 50 persen (lihat UNOCHA, 2021). Pada tahun 2020, komitmen bantuan pembangunan luar negeri (ODA) baru mencapai 0.32% terhadap GNI (lihat OECD, 2021).

Di lain sisi, remitansi di masa pandemi menunjukkan arah sebaliknya bertumbuh melampaui 7 persen dan mencetak rekor pertumbuhan tertinggi sejak 2008 (lihat KNOMAD, 2021). Remitansi juga menjadi mekanisme penanganan pandemi bagi warga dunia yang terperangkan dalam krisis kemanusiaan. Namun di tengah keterbatasan ruang fiskal, arsitektur ketimpangan biaya remitansi telah mempersempit upaya penanganan yang mungkin diandalkan oleh negara–negara miskin dan berkembang. Dalam praktiknya, remitansi global tumbuh bersama ketimpangan dan minimnya komitmen pembiayaan pembangunan.

Meski menjanjikan sebagai mekanisme pembiayaan pembangunan, pandemi turut memberi dampak terhadap migrasi di tengah arus ekonomi global. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh Covid–19 dapatberlangsung lama, dalam serta meluas jika dilihat melalui lensa migrasi. Berulangnya gelombang wabah yang disertai dengan pembatasan mobilitas tidak dapat terelakkan bahkan hingga awal tahun 2022. Para pemimpin Kelompok Negara 20 juga telah menyampaikan komitmen mereka untuk mengambil langkah–langkah mendukung para migran, termasuk pekerja migran dalam upaya respons dan pemulihan pandemi, yang dilandasi semangat kerja sama internasional serta sejalan dengan kebijakan, undang–undang dan keadaan nasional guna memastikan penghormatan penuh terhadap hak asasi dan kebebasan dasar terlepas dari status mereka (lihat Deklarasi; 38; 2021). Pemenuhan hak–hak sipil dan politik selama pandemi bergantung pada pemenuhan hak–hak ekonomi, sosial dan budaya. Namun, sering kali migran termasuk para pekerja migran mendapatkan stigma dalam wacana publik sebagai salah satu penghantar wabah. Pengenaan bahasa yang diskriminatif telah meningkatkan rasa tidak aman (lihat Crépeau and Vezmar, 2021) dan membuat hilangnya kesempatan untuk mendapatkan layanan kesehatan universal di negara–negara tempat mereka bermukim. Sebagai komunitas internasional, Kelompok Negara 20 memiliki peran dan pengaruh besar untuk mempengaruhi bahkan menciptakan norma–norma internasional baru. Sebagaimana kesepakatan pada presidensi sebelumnya, para pemimpin Kelompok Negara 20 juga telah menyatakan komitmen mereka terhadap migrasi yang aman, tertib dan teratur, sembarimenanggapi kebutuhan kemanusiaan dan akar penyebab perpindahan. Upaya kerja sama kebijakan migrasi ini secara khusus menjadi topik dialog pada Kepresidenan Indonesia dalam Kelompok Negara 20 di tahun 2022.

Pandemi juga telah menyebabkan kemunduran bagi kelompok–

kelompok warga dunia rentan lainnya, seperti warga lanjut usia (lansia), perempuan dan anak–anak. Sebelum masa pandemi, Perserikatan Bangsa–Bangsa melaporkan lebih dari setengah populasi dunia atau sekurangnya empat milyar warga dunia tidak mendapatkan manfaat perlindungan sosial (lihat UN, 2019). Di antara mereka, warga lansia menjadi salah satu kelompok korban yang sangat kasat mata terlihat berisiko lebih tinggi dari Covid–19. Warga lansia kerap diabaikan dalam strategi pembangunan dan kemanusiaan apalagi dalam pembiayaan pendanaan yang dibutuhkan mereka. Lebih dari 65 persen orang berusia 65 tahun ke atas saat ini tinggal di negara–negara miskin dan berkembang dan menghadapi lebih banyak hambatan untuk mewujudkan hak mereka atas kesehatan (lihat UNDESA, 2019). Di negara–negara tersebut, kualitas layanan sering kali buruk di mana sistem perawatan kesehatan cenderung lebih lemah, dan warga lansia menghadapi hambatan akses yang besar seperti keterjangkauan, aksesibilitas fisik, hingga diskriminasi berdasarkan usia. Negara–negara berkembang diproyeksikan akan menjadi rumah bagi lebih dari dua pertiga populasi dunia yang lebih tua (1,1 miliar) pada tahun 2050 (ibid, UNDESA, 2019).

Dampak krisis tidak pernah netral gender, demikian halnya dengan dampak Covid–19. Pandemi telah memperluas ketimpangan gender dan ekonomi. Perempuan dan anak perempuan terpapar oleh dampak ekonomi dan sosial yang paling parah baik berupa kehilangan pekerjaan ataupengurangan jam kerja, peningkatan intensitas perawatan dan pekerjaan rumah tangga, tekanan pada kesehatan fisik dan mental hingga minim menerima bantuan atau perlindungan sosial baik dari pemerintah maupun non–pemerintah (lihat UN Women, 2021). Pada tahun 2021 sekitar 435 juta perempuan dan anak perempuan akan hidup dengan kurang dari $1,90 per hari –termasuk 47 juta lainnya diperkirakan akan terjerembap ke dalam kemiskinan akibat COVID–19 (lihat UN Women, 2020).

356 juta anak diperkirakan hidup dalam kemiskinan ekstrem, dengan sekitar 100 juta anak lainnya telah jatuh ke dalam kemiskinanmultidimensi akibat COVID-19 (lihat UNICEF, 2021). Anak-anak kini dua kali lebih mungkin dibandingkan orang dewasa untuk hidup dalam situasi kemiskinan ekstrem. Sebagaimana laporan sebelum masa pandemi, satu dari lima anak hidup dalam situasi kemiskinan ekstrem dan efek negatif dari kemiskinan memiliki konsekuensi yang dapat berlangsung seumur hidup mereka (lihat WB and UNICEF, 2016). Menurut laporan Save the Children (2020) penutupan sekolah di masa pandemi telah mengganggu pendidikan bagi 1,6 miliar anak danpengalaman selama wabah Ebola menunjukkan banyak anak perempuan tidak akan pernah kembali ke bangku sekolah karena meningkatnya tekanan untuk bekerja, menghadapi risiko pernikahan anak dan larangan hamil bersekolah, hingga kehilangan kontak dengan pendidikan. Laporan yang sama turut menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan wabah yang telah ada jauh sebelum Covid-19, di mana diperkirakan satu dari 10 anak perempuan di seluruh dunia pernah mengalami pemerkosaan atau kekerasan seksual. Pandemi telah membuka mata dunia atas

tingginya gunung es persoalan kekerasan berbasis gender di seluruh dunia.

Tindakan harus diambil sekarang untuk menghentikan berbagai kemunduran yang dihadapi oleh berbagai kelompok warga rentan dunia tersebut. Mereka semestinya menjadi arsitek sekaligus penerima manfaat dari setiap upaya untuk membangun kembali lebih kuat dan lebih baik Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Rekomendasi

1. **Mendesak Kelompok Negara 20 untuk mengurangi disparitas dan jurang pembangunan antar–negara melalui perluasan strategi pemulihan ekonomi dunia dengan mengadopsi pendekatan yang lebih berbasis hak asasi manusia** disertai upaya mengatasi diskriminasi yang menyebabkan dan melanggengkan kemiskinan guna menghindari meluasnya ketimpangan pemulihan lebih lanjut (*no one and no country should be left behind*). Hak–hak sipil dan politik yang berperan penting dalam pengentasan kemiskinan perlu segera diperluas. Para pemimpin Kelompok Negara 20 hendaknya memberikan lebih banyak sarana ke tangan warga dunia yang paling terkena dampak dan benar–benar membutuhkan pertolongan selain turut dituntut memastikan mekanisme pemantauan terhadap respons pilihan kebijakan dan berbagai inisiatif serupa lainnya guna memberikan legitimasi pada deklarasi yang telah diserukannya. Sikap politik ini sejalan dengan ketegasan Presiden Jokowi dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (lihat Pidato Presiden RI dalam Sidang Majelis Umum PBB, 2020);
2. **Mendesak Kelompok Negara 20 untuk meningkatkan investasi ketangguhan yang berkualitas dengan menutup celah tunadana kemanusiaan** agar lebih memadai, multi–tahun dan fleksibel serta memperkuat kapasitas kepemimpinan lokal guna memastikan pemulihan yang berkelanjutan. Volume pendanaan yang dibutuhkan untuk respons kemanusiaan semakin tinggi dan memerlukan investasi guna membangun ketangguhan. Kebutuhan respons jangka panjang hingga upaya pemulihan yang dilakukan sepenuhnya memerlukan komitmen bantuan pembangunan luar negeri (ODA) pada tingkat 0.7% dari GNI dengan disertai pembiayaan konsesional baru bagi negara–negara berkembang (LDCs) hingga penambahan modal Bank Pembangunan Multilateral (MDB) sesuai dengan kebutuhan;

3. **Mendesak Kelompok Negara 20 mendorong kebijakan global mengenai pengurangan biaya remitansi sebagai sumber pendanaan potensial bagi pembangunan hingga 3%** (SDGs 10.c). Kelompok Negara 20 perlu memiliki kesadaran baik sebagai negara pengirim maupunpenerima bahwa remitansi memiliki kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas pembangunan manusia, karenanya sangat penting untuk mempermudah proses pengiriman remitansi yang aman, murah dan cepat melalui pemanfaatan teknologi digital

dan mendekatkan pekerja migran pada inklusi keuangan;

4. **Mendesak Kelompok Negara 20 untuk memperkuat skema perlindungan sosial adaptif dan responsif bagi kelompok warga dunia rentan** (GEDSI dan interseksionalitasnya), pekerja informal, pekerja rentan (*precariat*), migran, serta kerja tersamar dan tak berbayar (*unpaid carework*) melalui promosi kebijakan dekomodifikasi dan *fleksikuritas* sebagai upaya perlindungan universal (SDG 1.3, 3.8, 5.4). Termasuk memastikan daya lenting kebijakan jaminan sosial dalam situasi kerentanan khusus, seperti krisis kemanusiaan atau krisis kebencanaan terutama bagi migran, lansia, perempuan dan anak–anak yang minim serta situasi. Skenario mengurangi dampak bencana mesti mencakup analisis tentang proyeksi krisis yang kelak terjadi (*strategic foresight*) yang ramah anak sebagai generasi pemilik masa depan. Salah satu pengetahuan serta keterampilan untuk dapat menyelamatkan diri. Skema perlindungan sosial wajib memastikan kesetaraan akses kepada layanan kesehatan termasuk perawatan jangka panjang, dukungan sosial dan secara eksplisit mengidentifikasi, mempertimbangkan kebutuhan serta tantangan dan melibatkan mereka di setiap tingkatan bentuk perlindungan masa depan anak–anak tersebut dapat diwujudkan dengan mempromosikan *Universal Child Benefit*.

Rujukan

Abidoye, B., Felix, J., Kapto, S. & Patterson, L. (2021). Leaving No One Behind: Impact of COVID–19 on the Sustainable Development Goals (SDGs). New York, NY and Denver CO: United Nations Development Programme and Frederick S. Pardee Center for International Futures.

COVID–19 Spending Helped to Lift Foreign Aid to an All–Time High In 2020 But More Effort Needed. OECD Press Release, 13 April 2021. OECD, 2021.

Dilip Ratha, et.al. Migration and Development Brief 35: Recovery: COVID–19 Crisis through a Migration Lens." KNOMAD–World Bank, Washington, DC, 2021.

Financing for Sustainable Development Report 2021. Inter–agency Task Force on Financing for Development, New York, United Nations, 2021.

G20 Rome Leaders' Declaration, 2021.

Gabrielle Szabo and Jess Edwards. The Global Girlhood Report 2020: How COVID-19 is Putting Progress in Peril. Save the Children, 2020.

Ginette Azcona, et.al. From Insights to Action: Gender Equality in the Wake of Covid–19. UN Women, 2020.

Global Humanitarian Overview, 2021.

Global Humanitarian Overview, 2022.

Global Humanitarian Overview 2022, Part One: Global Trends, UNOCHA, 2022.

Gopinath, Gita. A Disrupted Global Recovery in IMF Blogpost, 25 January, 2022.

Infographic: End Poverty in All Its Forms Everywhere, United Nations, 2019.

Lauren Billi, et.al. Women and Girls Left Behind: Glaring Gaps in Pandemic Responses. UN Women, 2021.

Lloyd–Sherlock, P.; Ebrahim, S.; Geffen, L.; McKee, M. "Bearing the Brunt of Covid–19: Older People in Low and Middle Income Countries", BMJ, 2020.

ODA 2020 Preliminary Figures. OECD, 2020.

OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 2.

Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality. World Bank, Washington, DC, 2016.

Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2021, UN Women, 2021.

Transkrip Pidato Presiden RI dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Ke–75 Perserikatan Bangsa–Bangsa (Secara Virtual), Sekretariat Kabinet, 23 September 2020.

Transkrip Pidato Presiden RI dalam Sidang Majelis Umum ke–76 Perserikatan Bangsa–Bangsa (Secara Virtual), Sekretariat Kabinet, 23 September 2021.

Trends in response plan/ appeal requirements. Financial Tracking Service (FTS), UNOCHA, 2021.

United Nations Principles for Older Persons, Adopted by General Assembly resolution 46/91 of 16 December 1991. United Nations Human Rights Office of Higher Commissioner.

World Economic Outlook Update: Rising Caseloads, A Disrupted Recovery, and Higher Inflation, IMF, January, 2022.

World Population Ageing 2019, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2020.

CIVIL 20 Presidensi G20 Indonesia 2022
Kelompok Kerja SDGs dan Humanitarian
Email : c20.secretariat@g20-indonesia.id
Web : www.civil-20.org